

T E S I S

**PROBLEMATIKA PENGATURAN
PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

HERMI

NPM : 19310012

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

T E S I S

**PROBLEMATIKA PENGATURAN
PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA**



Diajukan Oleh :

HERMI

NPM : 19310012

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS

**PROBLEMATIKA PENGATURAN
PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA**

DIAJUKAN OLEH:

HERMI

NPM: 19310012

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal, 09 Juni 2021

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum.

Pembimbing II



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS
PROBLEMATIKA PENGATURAN
PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:



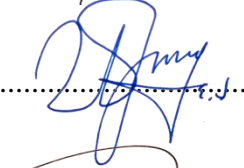
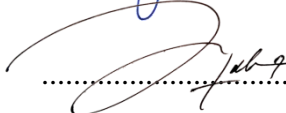
HERMI

NPM: 19310012

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 20 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.	Ketua	
Dr. Suhandi, S.H., M. Hum.	Anggota	
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum.	Anggota	
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal, 03 Juli 2021

Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada sumber inspirasi yang hakiki Allah Swt. atas segala kenikmatan dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih mulia yang berhias kesabaran dan bermahkota kehormatan, Nabi Muhammad saw. Bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua Aba dan umik, H.Abd.Azis dan Hj.Meskiyah. Saudara tercinta Kak Ferdi, Adek Erna, Hoyrol,Radit yang memberi kasih sayangnya.
2. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
5. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum dan Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, waktu dan dorongan dengan sabar.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan.
7. KH.Abdul Hamid Abdullah selaku pengasuh PPTQ dan Imam Besar Masjid Nasional Al Akbar Surabaya yang telah memberi tempat tinggal, nasehat, doa, semangat dan motivasi untuk terus menjadi yang terbaik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan belajar di Prodi Magister Ilmu Hukum angkatan 2019 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya,



HERMI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HERMI
NPM : 19310012
Alamat : Dusun Bates Desa Paseseh Tanjungbumi Bangkalan
No. Telpon (Ponsel) : 08563293938

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PROBLEMATIKA PENGATURAN PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 09 Juni 2021
Yang menyatakan,



HERMI
NPM. 19310012

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Kajian Teoritis.....	8
6. Metode Penelitian.....	26
7. Pertanggungjawaban Sistematis.....	30
BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA	
1. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia.....	32
a. UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	33
b. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.....	33
c. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).....	37

2. Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia.....	38
a. Subjek dan Peristiwa Tindak Pidana Kebiri Kimia.....	38
b. Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.....	41
3. Contoh Kasus Pidana Kebiri Kimia.....	47

BAB III PROBLEMATIKA PENGATURAN PELAKSANAAN PIDANA

KEBIRI KIMIA

1. Kendala Pengaturan Pelaksanaan Kebiri Kimia.....	49
2. Upaya Pemerintah Menghadapi Kendala Pengaturan Pelaksanaan Kebiri Kimia	55

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	65
2. Saran.....	66

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Problematika Pengaturan Pelaksanaan Kebiri Kimia”, yang bertujuan untuk mengetahui: pengaturan pelaksanaan kebiru kimia dan problematika pelaksanaan pidana kebiru kimia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitiannya menggunakan bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yakni data primer, sekunder yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji problematika pelaksanaan kebiru kimia.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dan ditemukan bahwa pengaturan pelaksanaan pidana kebiru kimia terdapat dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat 4,5 dan 7. Sedangkan pelaksanaan kebiru kimia di atur dalam PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sedangkan Problematika pelaksanaan tindak pidana kebiru kimia Terdapat kendala dalam pelaksanaan pidana kebiru kimia yakni UU Perlindungan anak beserta PP nomor 70 tahun 2020 bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru Kimia, belum jelasnya biaya pelaksanaan pidana kebiru kimia, pemerintah belum membuat peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebiru kimia, lamanya eksekusi pelaksanaan kebiru kimia dan KUHP tidak mengatur tentang kebiru kimia.

Dengan masih adanya kendala dalam pelaksanaan tindak kebiru kimia maka pemerintah untuk segera melengkapi peraturan yang belum sempurna sebelum terpidana menjalani masa kebiru kimia. Upaya lainnya jaksa bisa memerintahkan Kedokteran Kepolisian sebagai eksekutor pelaksanaan kebiru kimia dan yang terakhir Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru Kimia di tinjau ulang kembali.

Kata Kunci: perlindungan anak, kebiru kimia, pidana.

ABSTRACT

The thesis entitled "Problematics of the Implementation of Chemical Castration Management", which aims to find out: the regulation of the implementation of chemical castration and the problems of the implementation of chemical castration.

The research method used is normative juridical with research using materials obtained through library materials, namely primary and secondary data which are then analyzed and draw conclusions from the problems that will be used to test and examine the problems of implementing chemical castration.

Based on the results of the study, it was concluded and found that the regulation on the implementation of chemical castration is contained in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection Article 76D and Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 81 paragraphs 4,5 and 7. While the implementation of chemical castration is regulated in PP Number 70 of 2020 concerning Governance how to carry out chemical castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation, and announcement of the identity of perpetrators of sexual violence against children.

Meanwhile, there are obstacles in the implementation of chemical castration, namely the Child Protection Act and Government Regulation Number 70 of 2020 which contradicts the fatwa of the Honorary Council and Medical Ethics (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration. , the government has not made a ministerial regulation on technical instructions for the implementation of chemical castration, the duration of the execution of chemical castration and the Criminal Code does not regulate chemical castration.

With still obstacles in the implementation of chemical castration, the government must immediately complete the regulations that are not perfect before the convict undergoes chemical castration. Another effort is that the prosecutor can order Police Medicine as the executor of the implementation of chemical castration and finally the Fatwa of the Honorary Council and the Medical Code of Ethics Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration is reviewed again.

Keywords : *child protection, chemical castration, criminal.*